

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Mahfudz, A. (2021). *Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).
- Arifin, M. (2021). *Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasi Pemerintahan dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ayuningtyas, D. (2021). Model Kelembagaan Desa Wisata Berbasis Partisipatif di Jawa Timur. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15(3).
- Eka Putra Jaya. (2024). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Evi Yulianti, & Tanuwijaya, H. (2020). Tipologi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Desa Wisata di Desa Nglanggeran. *Jurnal Kawistara*, 9(1).
- Fitriyah, H. (2023). Teknik Penyusunan Laporan Penelitian Kualitatif. *Jurnal Riset Pendidikan Islam*, 10(1).
- Fitriyani, A. (2021). Analisis Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier dalam Program Perlindungan Sosial. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(2).
- Heriyanto, H., Farah, R., & Fariq, A. (2023). Fiqh Siyasah: The Concept of Statehood in Islam and Its Implications for State Administration. *At Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 10(2).
- Herlan Suherlan, Adriani, Y., Evangelin, B. C., Rahmatika, C., Pah, D. A. S., Fauziyyah, I. J., Wibowo, L. A., & Hanafi, M. J. S. (2022). Keterlibatan Masyarakat dalam Mendukung Program Desa Wisata: Studi Deskriptif Kualitatif pada Desa Wisata Melung, Kabupaten Banyumas. *Barista: Jurnal Kajian Bahasa dan Pariwisata*, 9(1).

- Jules Pretty. (2020). *Participatory Learning for Sustainable Development*. London: Earthscan.
- Kemenparekraf. (2022). *Pedoman Umum Desa Wisata Berkelanjutan*. Jakarta.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI)*.
- Mahfud, C. (2021). Pendekatan Lapangan dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 8(1).
- Mahiransyah. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Blue Lagoon di Desa Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marpaung, B., & Darmawan, M. (2022). Peran serta masyarakat dalam desa wisata berbasis budaya lokal. *Tourism and Society Journal*, 4(1).
- Moh Hidayatullah. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Alam (Studi di Desa Wisata Kalibiru, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo). Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mulyadi, E. (2022). Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi dalam Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2).
- Mukhlis, M. M., Maskun, M., Tajuddin, M. S., Aslan, J., Hariyanto, H., & Samosir, H. (2024). Regional Autonomy System: Delegation of Authority and Power of Regional Government in Indonesia in the Study of Fiqh Siyasah. *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2).
- Muslichah, I. (2022). Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif: Validitas Data Lapangan. *Jurnal Ilmu Sosial Religius*, 6(2).
- Muslih, M. (2021). *Metodologi Penelitian Islam: Pendekatan Fikih Sosial dan Fikih Siyasah*. Jakarta: Prenada Media.
- Mustafid. (2023). Etika Pemerintahan Berbasis Fiqh Siyasah Di Era Digital. *El Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 11(1).
- Nugroho, A. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1).

- Pina Azizah, Hilmi, M. I., & Fajarwati, L. (2023). Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Pancer Lestari). *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 7(2).
- Pradini, R. P. (2022). Implementasi Program Desa Wisata dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Kota Batu). Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Prasetyo, H., & Handayani, L. (2022). Efektivitas Program Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Timur. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 10(1).
- Putri, M. R., & Sahid, M. (2023). Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Van Meter dan Van Horn. *Jurnal Tanwir*, 5(1).
- Ramadhan, M., & Setiawan, A. (2021). Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Desa*, 7(2).
- Resti Oktaviarni. (2023). Analisis Pengembangan Desa Wisata Berbasis Penta Helix di Desa Jambu Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(1).
- Ridlwan, M. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2).
- Ridho, H., Khairi, A., Mujib, A., & Ahmed, S. (2024). Adaptation of Siyash Fiqh as a Strategy to Prevent Money Politics in Elections. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 6(2).
- Sari, A., & Hidayatullah, A. (2021). Kolaborasi masyarakat dan pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata komunitas. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2).
- Suartha, I. N. (2020). Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. *Jurnal Kepariwisata*, 19(2).
- Subarsono, A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiarti, D., & Handayani, R. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 17(2).
- Umar, N. (2022). *Fikih Tata Kelola: Etika Politik Islam dalam Konteks Modern*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Wamba, N. G. (2011). Empowerment in Development: A Comparative Analysis. *Journal of Social Development in Africa*, 26(1).
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: CAPS.
- Wulandari, D. A., & Sumartono, S. (2020). Strategi Persiapan Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3).

Undang-Undang

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, Pasal 4.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). Standar Kegiatan Desa Wisata.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 4, Pasal 7.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 4, Pasal 3.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022
- Peraturan Daerah Jawa Timur Pasal 23 No 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Desa Wisata.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun (2009) Tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.